

Krisis Infrastruktur dan Realita Pengelolaan Sampah Nasional: Menakar Kapasitas Fiskal dan Ekologi Daerah

EDISI AGUSTUS 2026



PRESENTED BY:

Green Living Support

TABLE OF CONTENT

02	Timbulan Sampah: Ancaman Ekologis di Balik Pertumbuhan Penduduk
Jebakan Infrastruktur: Ketika Open Dumping Menjadi Bumerang	03
04	ALASAN KETIMPANGAN
Kabar Baik dari Fasilitas Berbasis Masyarakat (BSU & TPS 3R)	05
06	Ancaman
Rekomendasi Aksi: Menyelaraskan Anggaran dan Ekologi	07
08	Daftar Pustaka



Timbulan Sampah: Ancaman Ekologis di Balik Pertumbuhan Penduduk

Dengan jumlah populasi yang menembus angka 279,08 juta jiwa pada tahun 2026, Indonesia menghadapi residu pembangunan yang tidak bisa dihindari: lonjakan produksi sampah masif setiap harinya. Berdasarkan data termutakhir dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), secara agregat nasional, timbulan sampah telah mencapai angka 144.349 ton per hari (tpd).

Secara teori ekonomi dan pembangunan, pengelolaan sampah adalah layanan dasar yang merepresentasikan seberapa jauh sebuah daerah berinvestasi pada keberlanjutan lingkungannya. Namun, analisis terbaru dari tim peneliti Green Living Support (GLS) mengungkap sebuah defisit struktural yang kritis: dari total 144.349 tpd timbulan sampah tersebut, hanya 24,73% (35.697 tpd) yang tercatat sebagai sampah terkelola. Artinya, ada beban ekologis sebesar 75,27% atau 108.652 ton sampah per hari yang belum terkelola dan dibiarkan menumpuk, berpotensi besar mencemari ekosistem tanah dan air.



Jebakan Infrastruktur: Ketika Open Dumping Menjadi Bumerang

Apakah status wilayah sebagai pusat ekonomi atau wilayah administratif ibu kota selalu menjamin kualitas infrastruktur pengelolaan sampah yang modern?

Dengan menelaah basis data 512 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang melayani wilayah di Indonesia, penelitian ini menemukan fakta yang memprihatinkan di lapangan. Mayoritas daerah masih terjebak pada operasional fasilitas Open Dumping (pembuangan terbuka tanpa pengolahan). Wilayah metropolitan seperti Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, yang memproduksi timbulan sampah masing-masing di atas 2.000 tpd, ironisnya masih menyisakan lebih dari 80% sampah belum terkelola dengan status fasilitas yang masih *Open Dumping*.

ALASAN KETIMPANGAN

Jika kita mengerucutkan analisis pada lanskap Jawa Timur, terlihat jelas ketimpangan visual dan struktural antara wilayah metropolitan dan kawasan berkembang. Kondisi ketimpangan tata kelola ini terjadi karena dua alasan utama:

1 Kapasitas Fiskal dan *Economies of Scale*

Wilayah pusat aglomerasi seperti Kota Surabaya berhasil menembus angka 98,26% sampah terkelola (dari total 1.811 tpd) karena memiliki kapasitas ekonomi untuk bertransisi menuju *Sanitary Landfill*. Sebaliknya, daerah yang sedang memacu pertumbuhan seperti Kabupaten Bojonegoro dan kawasan Mataraman seperti Kabupaten Tulungagung masih kesulitan berinvestasi pada infrastruktur modern.

2 Defisit Infrastruktur Daerah

Keterbatasan anggaran menyebabkan daerah bergantung pada Open Dumping. Wujud nyata dari defisit ini terlihat di Kabupaten Tulungagung yang menyisakan 92,03% sampah belum terkelola (dari 455 tpd), serta Kabupaten Bojonegoro dengan 68,40% sampah belum terkelola (dari 368 tpd).





Kabar Baik dari Fasilitas Berbasis Masyarakat (BSU & TPS 3R)

Di tengah ancaman kejenuhan TPA berstatus *Open Dumping* yang merusak pemandangan dan kesehatan lingkungan, masih ada secercah harapan dari sisi ekonomi sirkular dan partisipasi masyarakat. Konsep pengelolaan sampah dari sumber (*source reduction*) terbukti menjadi katup pengaman ketika infrastruktur makro pemerintah daerah tidak memadai.

Berdasarkan data operasional, kekuatan ekonomi sirkular masyarakat yang terekam dalam foto-foto kegiatan akar rumput patut diapresiasi. Saat ini tercatat ada 22.568 Bank Sampah Unit (BSU) Aktif, 414 Bank Sampah Induk (BSI) Aktif, dan 2.904 TPS 3R Aktif di seluruh Indonesia. Keberadaan fasilitas partisipatif ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat tumpukan sampah bukan sekadar sisa buangan menjijikkan, tetapi sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi jika dipilah dengan benar.

ANCAMAN

Defisit Anggaran dan Ketiadaan RIPS

Meskipun kekuatan ekonomi sirkular terus tumbuh di lorong-lorong perkampungan, krisis pengelolaan sampah pada skala makro berakar pada masalah kebijakan publik yang lebih dalam.

Rendahnya performa penanganan sampah di berbagai kabupaten/kota, seperti yang terlihat dari potret buram lingkungan kita dipicu oleh kombinasi tiga faktor utama:

1. **Rasio APBD Persampahan yang Stagnan:** Secara nasional, rata-rata alokasi APBD untuk sektor persampahan sangat mengengaskan, yakni hanya sebesar 2,17%. Angka ini sangat tidak memadai untuk melakukan perombakan fisik dari *Open Dumping* menuju *Controlled Landfill* atau *Sanitary Landfill*.
2. **Kekosongan Landasan Hukum (RIPS):** Ketiadaan atau lambatnya pengesahan Rencana Induk Persampahan (RIPS) di berbagai daerah (banyak yang berstatus "Draft Belum Disahkan" atau "Tidak Ada") membuat tata ruang pembangunan infrastruktur hijau tidak memiliki peta jalan yang mengikat secara hukum.
3. **Progres Sanksi Administrasi yang Rendah:** Meskipun tingkat verifikasi lapangan oleh pemerintah pusat telah mencapai 94,96%, tindak lanjut berupa progres sanksi administrasi masih tertahan di angka 48,87%. Pelanggaran standar ekologi di lokasi TPA lambat ditindak secara tegas.

Rekomendasi Aksi: Menyelaraskan Anggaran dan Ekologi

Pembangunan ekonomi yang mengorbankan kualitas sanitasi dan membiarkan ruang publik dipenuhi sampah adalah sebuah ilusi kesejahteraan. Agar residu dari pertumbuhan penduduk dan konsumsi tidak menjadi bom waktu ekologis yang merusak wajah kota, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan harus segera mengimplementasikan empat kebijakan fundamental:

1 Restrukturisasi Anggaran Daerah:

Mendesak kenaikan persentase rasio APBD di sektor persampahan agar daerah berkembang mampu melakukan eskalasi fisik operasional TPA.

2 Penghapusan Metode *Open Dumping*:

Mempercepat penutupan TPA terbuka dan beralih minimal pada sistem *Controlled Landfill*, demi mencegah krisis pencemaran air tanah akibat lindi dan polusi udara dari gas metana.

3 Mandatori Pengesahan RIPS:

Menjadikan dokumen RIPS sebagai syarat mutlak bagi setiap daerah dalam menyusun perencanaan tata ruang, agar ekspansi wilayah selalu diikuti dengan ketersediaan infrastruktur pengolah limbah.

4 Ekspansi Ekonomi Sirkular Berbasis Komunitas:

Memberikan insentif finansial dan pembinaan teknis yang masif untuk memperbanyak jumlah BSU dan TPS 3R di permukiman, guna memotong laju suplai timbulan sampah sebelum bermuara menjadi bukit sampah di TPA.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa megah infrastruktur jalan dan gedung yang dibangun, tetapi dari kemampuannya mengelola residu konsumsi secara bertanggung jawab ke dalam satu napas pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, T. & Loof, H. (2011). Agglomeration and Productivity: Evidence from Firm-Level Data. *Journal of Economic Geography*, 11(1), 1-23.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2023*. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Brülhart, M., & Sbergami, F. (2009). Agglomeration and growth: Cross-country evidence. *Journal of Urban Economics*, 65(1), 48-63.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2023). *Data Kependudukan Semester I Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Duranton, G. (2015). Growing through cities in developing countries. *The World Bank Research Observer*, 30(1), 39-73.
- Firman, T. (2009). The continuity and change in mega-urbanization in Indonesia. *Cities*, 26(6), 327-339.
- Grossman, G., & Krueger, A. (1991). Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement. *National Bureau of Economic Research Working Paper*, 3914.
- Zhu, Y., & Xia, Y. (2018). Impact of industrial agglomeration on environmental pollution: Evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, 195, 1146-1155.
- Mardiansjah, F. H., Rahayu, P., & Rukmana, D. (2020). New Patterns of Urbanization in Indonesia: Emergence of Non-statutory Towns and New Extended Urban Regions. *Environment and Urbanization ASIA*, 11(2), 269-286.
- Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*. London: Macmillan.
- Roberts, M., Gil Sander, F., & Tiwari, S. (2019). *Time to ACT: Realizing Indonesia's Urban Potential*. Washington, DC: World Bank.
- Rozelle, S., Huang, J., & Zhang, L. (1997). Poverty, population and environmental degradation in China. *Food Policy*, 22(3), 229-251.
- Stern, D. I. (2004). The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve. *World Development*, 32(8), 1419-1439.



Krisis Infrastruktur dan Realita Pengelolaan Sampah Nasional: Menakar Kapasitas Fiskal dan Ekologi Daerah

Edisi Agustus 2026

EDITORIAL ADDRESS:

Green Living Support
Perum YKP Pandugo 1 Jl. Penjaringan Timur 8 Blok PE 14,
Penjaringan Sari, Rungkut, Surabaya, East Java, Indonesia

Phone Number: (62) 823 4195 9989
WhatsApp: (62) 823 4195 9989
Instagram: @greenliving.support
E-mail: admin@greenlivingsupport.or.id